

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Administrasi Publik dapat diibaratkan sabagai tali penghubung antara pemerintah dengan masyarakat (publik). Administrasi publik digunakan untuk lebih memahami hubungan tersebut dan dapat meningkatkan responsibilitas sebuah kebijakan publik demi keefektifan dan keefisienan pelaksanaannya.

Dalam pengembangan administrasi publik harus memperhatikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau eksistensi dari suatu bidang yang dikelolanya, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pengembangan administrasi publik, khususnya dari lingkungan luar. Dapat dilihat dari aspek-aspek seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan teknologi.

Berbicara mengenai lingkungan, hingga saat ini yang memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan administrasi publik dan menjadi fokus utama adalah lingkungan global atau globalisasi.

Suatu Negara pasti akan mengikuti jalannya globalisasi, hal itu diperlukan untuk kemajuan Negara tersebut, globalisasi tersebut masuk ke berbagai sektor, masuknya globalisasi tersebut ditandai dengan adanya kerjasama antar negara atau kerjasama regional. Suatu Negara dituntut untuk dapat berkompetisi demi memajukan

kawasannya dan menjadi yang terbaik, hal itu dikarenakan adanya persaingan yang sangat tinggi dalam dunia globalisasi.

Di Indonesia sendiri memiliki kebijakan otonomi daerah, kebijakan tersebut terdapat pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas sektor publik. Daerah otonom memiliki wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Hal itu tentu sangat menguntungkan bagi daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tinggi. Daerah yang memiliki potensi SDA yang tinggi menuntut pemerintah daerah tersebut untuk dapat mengelolanya dengan baik. Selain potensi SDA pemerintah juga harus dapat mengelola dan mengembangkan potensi daerah di sektor perdagangan.

Berbicara mengenai perdagangan pasti tidak jauh dari pasar. Potensi daerah di sektor perdagangan yang harus dikembangkan adalah pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki nilai yang tinggi di suatu daerah, karena dapat dijadikan sebagai mesin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pasar tradisional terdapat peluang usaha dan lapangan kerja sehingga dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat daerah tersebut dan dapat menjadi sarana untuk mempromosikan produk unggulan daerah tersebut.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah, agar dapat melaksanakan otonominya, maka Pemerintahan

Kota Semarang harus mampu meningkatkan semua pendapatannya, bisa berasal dari pajak daerah dan Retribusi Daerah yang masuk ke Kas Daerah Kota Semarang sesuai ketentuan yang berlaku dan disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu penyumbang dana terhadap PAD adalah pasar tradisional. Untuk itu perlu adanya suatu Dinas yang mengelola dan mengatur dana yang didapat untuk menjalankan otonomi daerah maka dibentuklah Struktur Organisasi Tata Kerja tentang adanya dinas Pasar. Dinas pasar merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dibentuk sebagai urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan dan keuangan daerah. Di samping itu Dinas Pasar harus bisa memberikan peranan aktif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengupayakan peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah diperlukan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Selain itu diperlukan adanya kesadaran diri dari masyarakat di Kota Semarang untuk ikut mendukung kelancaran tugas dari Dinas Pasar.

Sebagai Ibukota provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki potensi perdagangan yang cukup baik, sehubungan dengan yang telah kita bahas sebelumnya, potensi perdagangan tersebut mengarah kepada potensi pasar tradisional. Potensi pasar tradisional yang ada di Kota Semarang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Semarang, dan dengan adanya pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang tersebut diharapkan dapat menjadikan potensi sektor perdangan menjadi semakin berkembang.

Realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dari pungutan retribusi pasar hingga akhir tahun 2014 telah medekati dan ada juga yang melebihi target yang

ditentukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang, dan realisasi pendapatan tersebut dinilai sangat baik oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Target dan realisasi pendapatan Pasar tradisional Kota Semarang dapat terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan (Retribusi Pasar)
Dinas Pasar Kota Semarang

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2010	Rp 11.165.799.000	Rp 11.231.507.169	100.59
2.	2011	Rp 12.661.523.949	Rp 12.647.546.543	99.89
3.	2012	Rp 13.326.714.634	Rp 13.528.163.487	101.51
4.	2013	Rp 14.992.553.664	Rp 14.877.577.075	99.23
5.	2014	Rp 16.866.622.000	Rp 16.685.174.986	98,92

(sumber: Dinas Pasar Kota Semarang)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa Dinas Pasar Kota Semarang memberikan target retribusi pasar yang setiap tahunnya meningkat sebesar 12,5% . hal tersebut bertujuan supaya pendapatan dari retribusi pasar meningkat dan meningkatkan PAD Kota Semarang. Peran pasar tradisional sangat dibutuhkan dalam meningkatkan PAD Kota Semarang. oleh karena itu Dinas Pasar Kota Semarang harus berusaha untuk dapat

Dalam Perda Kota Semarang No 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional menjelaskan bahwa Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tena yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Hingga saat ini pasar tradisional yang dimiliki oleh Kota Semarang berjumlah 52 pasar, tetapi pada UPTD Pasar Johar yang berjumlah 9 pasar seringkali dianggap menjadi 1 pasar karena ke-9 pasar tersebut terletak pada 1 lokasi yang sama. Jadi bisa dikatakan jumlah pasar di Kota Semarang berjumlah 44 pasar dan tersebar di 16 wilayah Kecamatan dengan jumlah pedagang kurang lebih sebanyak 20.000 orang. Dapat kita lihat pada tabel tabel 1.2.

Tabel 1.2
Data Pedagang dan Dasaran per UPTD Wilayah di Kota Semarang Tahun 2015

No	UPTD	Jumlah Pasar	Jmlah Pedagang					Total
			Kios	Los	DT	Non DT	Pancakan	
1.	Johar	9	932	1.926	1.849	699	996	6.402
2.	Karimata	6	184	1.468	89	0	112	1.853
3.	Bulu	7	333	1.276	148	57	440	2.254
4.	Karangayu	7	261	1.355	663	138	939	3.356
5.	Jatingaleh	10	206	1.378	423	109	1.020	3.136
6.	pedurungan	13	782	1.702	474	0	580	3.538
	Jumlah	52	2.698	9.105	3.646	1.003	4.087	20.539

(sumber: Dinas Pasar Kota Semarang)

Dengan adanya beberapa pasar tradisional yang tersebar di Kota Semarang, diharapkan dapat mempermudah masyarakat/konsumen untuk memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Para produsen pun dapat mendistribusikan hasil produksinya secara mudah dan tersebar ke seluruh wilayah Kota Semarang.

Pasar memang memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat, meski demikian, masih banyak pasar tradisional yang memiliki kondisi yang kurang baik. Seperti kondisi pasar yang kotor karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan, barang dagangan yang melebihi kapasitas yang ditentukan sehingga menghalangi jalan, pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan zona jenis dagangan,

bangunan dan fasilitas pasar yang kurang terawat. Tentu saja kondisi tersebut sangat berpengaruh dan dapat mengurangi ketertarikan para calon pembeli untuk mengunjungi pasar tradisional. Jika hanya sedikit pembeli di pasar tradisional maka banyak pedagang yang dagangannya tidak laku dan banyak pedagang yang gulung tikar. Dengan begitu PAD yang akan didapat akan berkurang, karena salah satu sumber PAD adalah retribusi yang dipungut oleh Dinas Pasar kepada pedagang di pasar tradisional tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatasi masalah pasar tradisional tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dengan dibuatnya peraturan daerah tersebut bertujuan untuk:

1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
4. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi;
6. Mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan;
7. Mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang;
dan
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional tersebut terdapat ruang lingkup pengaturan pasar yang meliputi:

1. Pengelolaan;
2. Hak, kewajiban dan larangan;
3. Pengendalian; dan
4. Peran serta masyarakat pada pasar yang dibangun dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Berhubungan dengan kondisi pasar tradisional yang telah dibahas sebelumnya, hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana pengelolaan pasar tradisional di kota Semarang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Pada BAB IV Perda tersebut pengelolaan pasar terdiri dari beberapa bagian, yaitu: bagian kesatu, perencanaan; bagian kedua, pengadaan pasar; bagian ketiga, pemanfaatan pasar; dan bagian keempat, evaluasi pasar. Dalam penelitian ini akan mendalami salah satu bagian dari pengelolaan pasar, yaitu pemanfaatan pasar. Karena dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan pasar merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Pengaturan kawasan pasar dan pengaturan zonasi pasar;
2. Pengaturan perizinan;
3. Penyelenggaraan pelayanan pasar;

4. Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya; dan
5. Pemberdayaan pedagang pasar.

Sebagian besar pasar tradisional di Kota Semarang masih belum optimal dalam pemanfaatan pasarnya, karena pelaksanaan dari kelima rangkaian kegiatan dalam pemanfaatan pasar masih banyak menemui hambatan.

Dalam pengaturan kawasan pasar dan pengaturan zonasi pasar masih banyak pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pasar Kota Semarang dengan alasan tempat pedagang tersebut lebih strategis dan lebih luas dibandingkan dengan tempat yang disediakan pada zona jenis dagangannya. Seperti masih ada pedagang daging di zona sayuran, yang membuat pasar terkesan tidak rapi. Dinas Pasar Kota Semarang pun tidak berani untuk merubah bangunan pasar yang sudah lama, karena sangat sulit untuk mengatur pedagang dan tempat dagang yang sangat banyak dan sudah lama berdiri, selain itu menurut informasi yang didapat dari Kepala seksi penataan dan pemetaan Dinas Pasar Kota Semarang, menyatakan bahwa jumlah personil dari Dinas Pasar Kota Semarang juga tidak mencukupi.

Pedagang di Pasar tradisional juga masih ada yang tidak mematuhi perijinan berjualan di pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Seperti perpanjangan perijinan pedagang pasar tradisional setelah 3 tahun berjualan dan diberikan waktu paling lambat 7 hari sebelum masa berlaku perijinan habis, masih banyak pedagang yang mengabaikan peraturan tersebut. Dari hasil wawancara penggalan data awal kepada Kepala seksi perijinan, menyatakan bahwa dari banyaknya pedagang pasar tradisional yang ada di

Kota Semarang hanya sekitar 85% pedagang yang sadar dengan pentingnya perijinan tersebut disetiap pasarnya.

Penyelenggaraan pelayanan pasar bertujuan agar pasar tertib, aman, nyaman, sehat dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu pelayanan pasar wajib disediakan:

1. Kantor pengelola pasar;
2. Tempat parkir dan tempat bonkar muat;
3. Pelayanan kebersihan;
4. Masjid / musholla;
5. MCK;
6. Listrik, penerangan umum;
7. Pos ukur ulang;
8. Id card.

Disetiap pasar tradisional di Kota Semarang wajib memiliki 8 fasilitas pelayanan tersebut agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan pelayanan pasar. Sebagian besar pasar tradisional yang ada di Kota Semarang telah memiliki semua fasilitas pelayanan, tetapi, masih banyak pasar yang belum memiliki pos ukur ulang, hanya sebagian pasar yang memiliki pos ukur ulang, terutama pasar tradisional yang telah direvitalisasi. Dari Pernyataan salah satu staff seksi pemeliharaan bangunan pasar Dinas Pasar Kota Semarang hanya 4 pasar yang memiliki pos ukur ulang, yaitu, Pasar Bulu, Pasar Gayamsari, Pasar Rasamala dan Pasar Sampangan. Meskipun setiap pasar telah memenuhi kewajiban dengan fasilitas-fasilitas tersebut tetapi tidak diimbangi

dengan pemeliharaan yang baik, banyak fasilitas-fasilitas di pasar yang tidak terawat seperti banyak bangunan fasilitas yang rusak dan kotor.

Dalam pengontrolan kualitas dan fungsi bangunan dan fasilitas pasar dirasa masih tidak efektif. Karena masih banyak pasar yang memiliki bangunan pasar dan fasilitas yang tidak terawat, menurut hasil penggalan data awal dari wawancara dengan Kepala seksi pemeliharaan bangunan Dinas Pasar Kota Semarang, hal ini disebabkan karena minimnya anggaran untuk perawatan atau merevitalisasi bangunan pasar yang berjumlah 44 pasar, serta pengguna pasar termasuk pedagang dan pembeli yang kurang peduli dan kurang berpartisipasi dalam merawat bangunan pasar dan fasilitasnya. Dinas pasar Kota Semarang akan melakukan perbaikan hanya jika bangunan atau fasilitas pasar mengalami kerusakan yang parah.

Dalam pemanfaatan pasar yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan pedagang pasar, hal tersebut bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesejahteraan pedagang;
- Meningkatkan peran serta pedagang dalam pengelolaan pasar;
- Meningkatkan pelayanan pasar kepada masyarakat.

Untuk itu pemerintah daerah mengembangkan kebijakan berupa:

- Pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha;
- Pembinaan organisasi kumpulan/serikat pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengembangan dan pembinaan koperasi pedagang;

- Peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah dan / atau
- Kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan.

Dalam kenyataannya masih banyak pedagang yang tidak tahu mengenai kebijakan-kebijakan tersebut, dan menurut hasil penggalan informasi awal wawancara dengan Kepala Bidang pengaturan dan ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang, untuk pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha masih terkendala dan terbatas, karena dalam pengadaan dananya masih mengandalkan program pinjaman dari bank, padahal hanya sedikit bank yang menawarkan program tersebut dan hanya dalam waktu tertentu saja.

Setiap 1 tahun sekali Dinas Pasar Kota Semarang juga mengadakan pembinaan untuk para pedagang, Tetapi dalam pembinaan tersebut dirasa kurang efektif, karena tidak semua pedagang hadir dan tidak mengetahui informasi tersebut, terutama pedagang pancakan atau pedagang yang berjualan pada waktu-waktu tertentu saja. Padahal pembinaan tersebut dilakukan dengan sosialisasi untuk meningkatkan ketertiban pedagang, seperti, tujuan zonasi, pentingnya perijinan, tujuan pemungutan retribusi pasar dan lainnya.

Dari uraian diatas telah mewakili gambaran secara umum permasalahan pemanfaatan pasar tradisional di Kota Semarang, seperti:

1. Banyak pedagang yang tidak mematuhi pengaturan zonasi pasar.
2. Banyak pedagang yang tidak mematuhi perijinan pasar.
3. Banyak bangunan pasar dan fasilitas pasar yang rusak.

4. Pemberdayaan peagang pasar yang kurang efektif.
5. Sosialisasi kebijakan pemaanfaatan pasar berdasarkan Perda Kota Semarang no. 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional kepada pedagang yang kurang efektif.

Dari penjelasan tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan diberi judul **“Implementasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mengembangkan pasar tradisional di Kota Semarang agar tidak kalah saing dengan pasar modern.

1.2 Perumusan Masalah.

Di negara yang sedang berkembang tingkat perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi. Sehingga membuat mereka lebih memilih untuk berbelanja di pasar tradisional. Oleh sebab itu pasar tradisional banyak terdapat di Negara-negara yang sedang berkembang. Namun sejalan dengan perkembangan jaman, masyarkat lama kelamaan beralih ke pasar modern. Kasus seperti ini terlihat pada perilaku masyarakat Indonesia.

Di Kota Semarang selain adanya peningkatan pendapatan masyarakat, juga disebabkan banyaknya investor yang membangun pasar modern dengan berbagai fasilitas yang menarik hati masyarakat. Oleh sebab itu para pengelola pasar tradisional tidak tinggal diam untuk menghadapi hal tersebut, para pengelola pasar tradisional juga

berlomba untuk melakukan reposisi dan menciptakan kreatifitas baru agar dapat merebut kembali minat masyarakat terhadap pasar tradisional.

Pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan pengaturan pasar tradisional yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional agar masyarakat lebih tertarik untuk berbelanja di pasar tradisional. Karena, jika masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar modern, banyak pedagang pasar tradisional akan mengalami bangkrut dan tidak berjualan lagi, dengan begitu pendapatan dari retribusi pasar akan berkurang dan sangat berpengaruh dalam PAD Kota Semarang.

Di dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang masih terdapat masalah atau hambatan-hambatan dalam mencapai pelaksanaan kebijakan yang optimal.

Oleh karena hal tersebut perlu dilakukan perumusan masalah untuk menentukan fokus dari penelitian yang akan dilakukan. Maka obyek penelitian dari latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keefektifan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah didapat, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menilai keefektifan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.
2. Mengetahui pengaruh faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu administrasi publik khususnya di bidang kebijakan publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Penulis.

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

2. Bagi Pembaca.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang administrasi publik, khususnya di bidang kebijakan publik.

3. Bagi Pemerintah Kota Semarang.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi informasi untuk dapat lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan terbaik yang telah dikeluarkan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang.

1.5 Kerangka teoritis

1.5.1 Administrasi publik

Administrasi publik sebagai salah satu ilmu yang dianalogikan sebagai ilmu terapan dalam ilmu sosial atau disebut juga dengan social engineering, merupakan cabang ilmu sosial dan politik di Indonesia.

Menurut Dimock dalam (Sugandi 2011:2) mengatakan bahwa Administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan politiknya.

Prajudi Atmosudirjo dalam (Sugandi 2011:2) menerangkan juga bahwa Administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Administrasi publik yang diungkapkan oleh Stilman II (1991) yaitu bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi bahkan sulit untuk disepakati. Variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang dikutip Stilman II (1991) (Keban 2008:5), sebagai berikut:

1. Barton & Chappel melihat bahwa administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Nigro dan Nigro mengemukakan administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang, yaitu, yudikatif, legislatif dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

3. Nicholas Henry memberikan batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah.

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Kuhn dalam (Keban 2008:31) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis atau *anomalies*, maka kepercayaan dan wibawa dari cara pandang tersebut menjadi luntur atau berkurang. Orang mulai mencari cara pandang yang lebih sesuai, atau dengan kata lain muncul suatu paradigma baru. Nicholas Henry dalam (Keban 2008:31) mengungkapkan bahwa standard suatu disiplin ilmu, mencakup fokus dan locus. Berdasarkan dua kategori tersebut, Henry mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigme dalam administrasi negara, seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Paradigma 1 (1990-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi politik dan administrasi. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek "locus" saja yaitu *government bureaucracy*.

2. Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip Administrasi. Sedang locus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena menganggap prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Dalam paradigma ini, focus lebih ditekankan dari pada locusnya.

3. Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai ilmu politik. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

4. Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi publik sebagai ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Semua focus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu locusnya menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma tersebut telah memiliki focus dan locus yang jelas. Focus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan locusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Berdasarkan uraian di atas, khususnya pada Paradigma 5, Ilmu Administrasi publik saat ini telah menjadi disiplin ilmu yang mandiri dan menjadi wadah bagi ilmu-ilmu lain yang berada di bawahnya. Salah satu yang menjadi bagian dari ilmu administrasi publik adalah kebijakan publik. Oleh karena itu kebijakan publik merupakan ilmu yang masuk dalam bagian dari kajian ilmu administrasi publik.

1.5.2 Kebijakan Publik

Banyak ahli menjabarkan arti dari kebijakan publik, berberapa pendapat dikemukakan dengan kalimat yang berbeda-beda. Untuk mengetahui apa arti kebijakan publik secara jelas, maka peneliti berpedoman pada pendapat para ahli tersebut.

Perlu dibedakan istilah “kebijakan” dengan “kebijaksanaan” dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang pertama diatas menunjukan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilrang, atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Disini dapat dilihat bahwa kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu, sedangkan kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Dengan melihat perbedan tersebut maka diharapkan kedua istilah tersebut digunakan secara tepat sesuai dengan konteksnya (Keban 2008: 58).

Ide kebijakan publik sendiri mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau bukan milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah, aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Fermana 2009: 32).

Saat ini telah banyak para ahli yang menjabarkan tentang definisi dari kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Oleh karena itu, definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (subarsono 2012: 2).

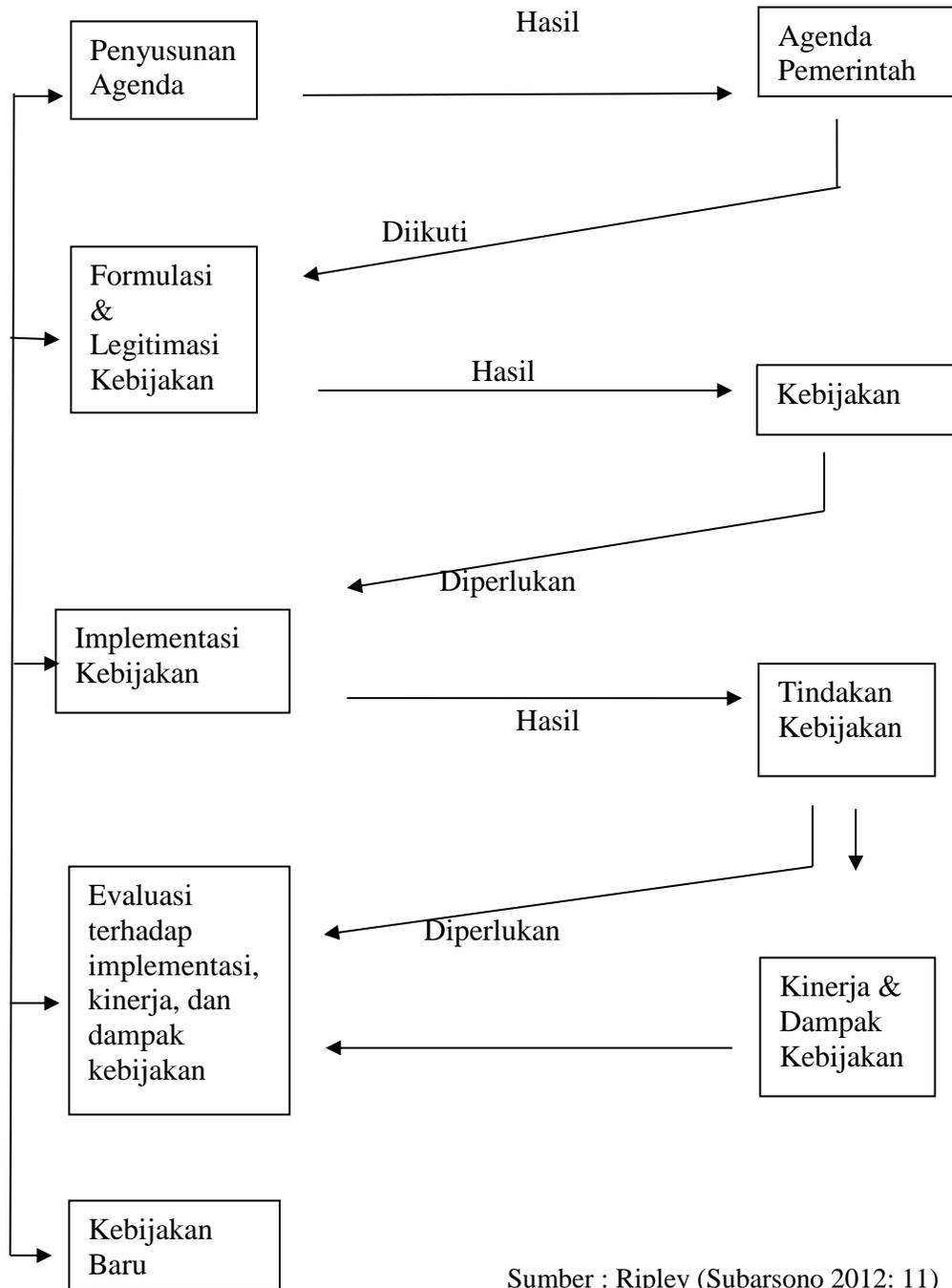
Menurut Willy N Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Anderson, kebijaksanaan publik (public policy) adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya (Syafiie 2006:106).

James Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.(subarsono 2012:2).

Dari pernyataan-pernyataan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh Negara.

Dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ada beberapa tahap penting, menurut pandangan Ripley (Subarsono 2012: 11), tahapan kebijakan publik digambarkan seperti pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Tahapan Kebijakan Publik



Sumber : Ripley (Subarsono 2012: 11)

Menurut Ripley, ada beberapa tahapan yang dilalui dalam membuat suatu kebijakan (Subarsono 2012: 11), yaitu:

1. penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang dilakukan, yakni:
 - (i) Membangun persepsi di kalangan stakeholder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah,
 - (ii) Membuat batasan masalah,
 - (iii) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
2. Pada Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternative-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
3. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, Pada Tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.
4. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan.
5. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Pada penelitian ini proses kebijakan publik yang akan dibahas adalah pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap terpenting dalam proses kebijakan publik. Dengan mengamati proses kebijakan pada tahap implementasi ini, dapat kita ketahui bagaimana suatu kebijakan yang

dilaksanakan. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan atau belum. Dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

1.5.3 Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah melalui tahap formulasi kemudian dilakukan tahap implementasi. Untuk memperjelas arti dari implementasi kebijakan, maka peneliti berpedoman pada pendapat dari beberapa ahli mengenai arti dari implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada. Pada tahap ini, proses monitoring dilakukan. Dan tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan. (Keban 2008: 67)

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan” (Winarno 2007:146).

Ada beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik menurut Riant Nugroho D. Yaitu, pendekatan secara *top-down*, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses

implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.

Sedangkan yang kedua adalah pendekatan secara *bottom-up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat.

Menurut Riant Nugroho D. Pada prinsipnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (Nugroho D. 2014: 686), yaitu:

1. Ketepatan kebijakan.

Pada ketepatan kebijakan ini dinilai dari:

- a. sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy*.
- b. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- c. Apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat Pelaksana.

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

3. Tepat target.

Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu:

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan.

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

- a. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga yang terkait.
- b. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista sebagai variabel eksogen yang terdiri atas:
 - *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan;
 - *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan
 - *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Ketepatan Proses.

Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu:

- a. *Policy acceptance*. Disini publik memahami sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah *memahami* sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- b. *Policy adoption*. Disini publik menerima sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah *menerima* sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- c. *Strategic readiness*. Disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, agar mudah dalam melakukan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *top-down*. Karena dalam

penelitian ini penulis meneliti implementasi Kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Dalam proses implementasi kebijakan tersebut peranan pemerintah sangat besar.

Dalam pendekatan *Top-down* dapat menggunakan model-model dari beberapa ahli untuk melihat apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan, seperti, Edwards III, Van Meter Van Horn, dll.

Dalam pandangan Edwards III dalam (Subarsono 2011: 90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang terjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengatur keberhasilan variabel komunikasi (Agustino, 2008: 150), yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya .

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

Dalam mengimplemmentasikan kebijakan indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen (Agustino,2008:152), yaitu:

- a. Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu, *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka

lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang akan ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edwards III dalam (Agustino, 2008: 153), adalah:

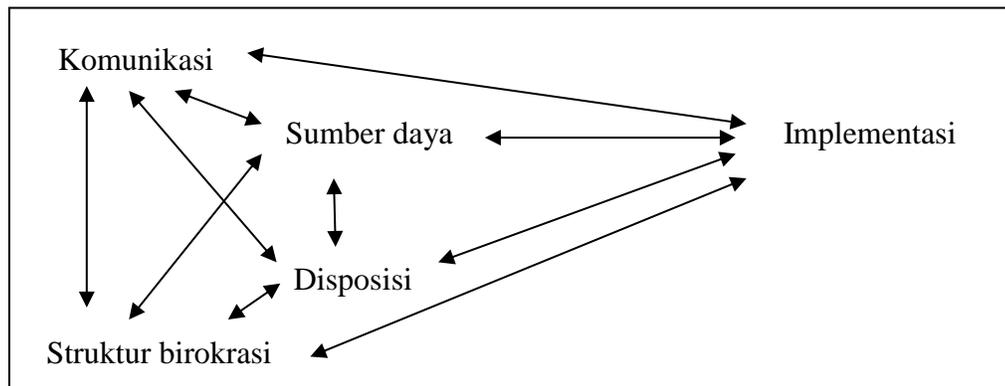
a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif, Edwards menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor yang bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 1.2
Faktor Penentu Implementasi menurut Edwards III



Sumber: Edwards III, 1980:148

Menurut Van meter dan Van Horn dalam (Subarsono 2011:94), ada

lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumberdaya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

3. Hubungan antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen Pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam variabel kondisi sosial, politik dan ekonomi ini mencakup :

- a. Sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan;
- b. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;
- c. Karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak;
- d. Bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan
- e. Apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor.

Dalam disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan
- c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Tabel 1.3
Variabel Sintesis Teori Implementasi Kebijakan

No.	Variabel	Edward III	Van meter dan Van Horn
1.	Komunikasi	Komunikasi	
2.	Sumberdaya	Sumberdaya	Sumberdaya
3.	Disposisi	Disposisi	Disposisi implementor
4.	Struktur Birokrasi	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antar organisasi • Karakteristik agen Pelaksana
5.	Kondisi sosial, politik dan ekonomi		Kondisi sosial, politik dan ekonomi
6.	Standar dan sasaran kebijakan		Standar dan sasaran kebijakan

(sumber: Subarsono 2011)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa ada kesamaan variabel dari teori implementasi kebijakan antara pendapat Edward III dan pendapat Van meter dan Van Horn, yaitu sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Perbedaan variabel terdapat pada komunikasi, kondisi sosial, politik dan ekonomi, lalu standar dan sasaran kebijakan.

Maka penulis akan meneliti faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang menggunakan 6 (enam) variabel yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumberdaya;
3. Disposisi;
4. Struktur Birokrasi;
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi;
6. Standar dan sasaran kebijakan.

1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena Penelitian berarti peneliti menjelaskan tentang fenomena yang akan digunakan beserta kemungkinan-kemungkinan dalam penelitian.

Studi kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar

tradisional di Kota Semarang. Kemudian mengidentifikasi apa saja penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, maka:

1. Berdasarkan dengan “lima tepat” (Nugroho,2014: 686), untuk menilai keefektifan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang, yang diamati antara lain:

a. Ketepatan Kebijakan.

Ketepatan kebijakan adalah kondisi dimana tujuan-tujuan dari kebijakan pemanfaatan pasar di kota Semarang dapat tercapai dan dapat memecahkan masalah yang ada. Ketepatan kebijakan dapat diamati melalui fenomena sebagai berikut:

- Tingkat capaian tujuan dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Tingkat pemecahan masalah yang ada dalam pemanfaatan pasar di kota Semarang.

b. Ketepatan Pelaksana.

Ketepatan Pelaksana adalah ketepatan aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang, tidak hanya pemerintah, ada beberapa lembaga pelaksana, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Ketepatan pelaksana dapat diamati melalui fenomena sebagai berikut:

- Tingkat ketepatan aktor yang terlibat dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Pengaruh aktor yang terlibat dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

c. Ketepatan Target.

Ketepatan target adalah kondisi dimana target-target dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang sesuai dengan yang direncanakan dan siap untuk diintervensikan. Fenomena yang diamati dalam ketepatan target adalah:

- Tingkat Ketepatan target dari kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Tingkat kesiapan target dalam intervensi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

d. Ketepatan Lingkungan.

Ketepatan lingkungan adalah kondisi mengenai hubungan yang baik antara kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dengan lingkungan kebijakan tersebut. Lingkungan kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu:

- Lingkungan internal adalah interaksi antara lembaga perumus kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dan pelaksana kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dengan lembaga lain yang terkait.

- Lingkungan eksternal adalah persepsi publik, lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, serta individu yang dapat memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional dan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam ketepatan lingkungan, fenomena yang dapat diamati adalah sebagai berikut:

- Tingkat interaksi antara lembaga perumus kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dan pelaksana kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dengan lembaga lain yang terkait.
- Tingkat persepsi publik, lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, serta individu yang dapat memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional dan implementasi kebijakan tersebut.

e. Ketepatan proses.

Ketepatan proses adalah kondisi dimana publik dapat memahami, menerima dan siap melaksanakan atau menjadi bagian kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. Di sisi lain pemerintah memahami dan menerima sebagai tugas yang harus dilakukan. Ketepatan proses dapat diamati melalui fenomena sebagai berikut:

- Tingkat pemahaman dan kesiapan publik terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Tingkat pemahaman pemerintah terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

2. Keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dapat dinilai berdasarkan 6 (enam) variabel sintesis teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III dan Van meter dan Van Horn, yaitu:

a. Komunikasi.

Komunikasi adalah faktor utama terwujudnya efektifitas implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. dengan komunikasi yang tepat dan jelas, implementor kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dapat ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran (target group). Komunikasi kebijakan pemanfaatan pasar di kota Semarang dapat diamati melalui fenomena sebagai berikut:

- Tingkat transmisi dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang;

- Tingkat kejelasan dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang;
- Tingkat konsistensi dari para pelaksana stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

b. Sumberdaya.

Sumberdaya adalah faktor yang juga tidak kalah penting dari komunikasi, karena jika komunikasi dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang sudah dilakukan dengan tepat tetapi implementor kekurangan sumberdaya maka akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumberdaya dibedakan menjadi 2 bentuk, sumberdaya manusia dan sumberdaya non-manusia. Sumberdaya pemanfaatan pasar di kota Semarang dapat diamati melalui fenomena sebagai berikut:

- Tingkat dan kuantitas staf dan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang;
- Kualitas dan kuantitas fasilitas yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

c. Disposisi.

Disposisi adalah faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. Disposisi atau watak dan karakteristik implementor kebijakan yang baik dapat menjalankan kebijakan pengaturan pasar tradisional dengan baik pula. Seperti komitmen, kejujuran, demokratis serta paham terhadap kebijakan tersebut. karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Implementor dalam pelaksanaan kebijakan yang baik memiliki watak dan karakteristik yang baik pula, seperti komitmen, jujur dan demokratis. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang, disposisi dapat diamati melalui fenomena sebagai berikut:

- Sikap yang dimiliki para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Respon dari para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

d. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota

Semarang. aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). Selain itu, juga perlu koordinasi dan kerjasama yang baik agar pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang berjalan efektif. Dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dapat diamati melalui fenomena sebagai berikut:

- Tingkat efektifitas prosedur operasi yang standar (*standar operating procedure* atau SOP) struktur organisasi dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. faktor ini mencakup dukungan-dukungan dari sumberdaya ekonomi, kelompok-kelompok sosial dan elite politik atas kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. Kondisi sosial, politik dan ekonomi dapat diamati melalui fenomena berikut :

- Tingkat dukungan sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Tingkat dukungan kelompok-kelompok kepentingan terhadap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Tingkat dukungan elite politik terhadap implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

f. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan adalah standar dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. standar dan sasaran yang baik harus jelas dan terukur agar tidak terjadi multi interpretasi yang dapat menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Dalam faktor ini dapat diamati melalui fenomena sebagai berikut:

- Kualitas standar kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.
- Ketepatan sasaran kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan umum penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif dan jenis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta fenomena-fenomena menurut pandangan dan definisi partisipan. Penelitian metode kualitatif dan jenis deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

1.7.1 Desain Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif dan eksploratif. Masri Singaribun (2006: 4) dalam bukunya menjelaskan dua jenis penelitian tersebut, yaitu:

- a. Penelitian Deskriptif. Suatu usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala-gejala dan menetapkan pengaruh antar gejala-gejala yang ditemukan.
- b. Penelitian Eksploratif. Studi penelitian yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu, dengan maksud untuk merumuskan masalah-masalah secara terperinci.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi dan hambatan-hambatan dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan sasaran yang tepat, sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala dari suatu kelompok atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala-gejala yang lain dalam masyarakat (objek penelitian).

Peneliti akan mengamati proses implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dengan menggunakan sudut pandang implementasi dan pendekatan Model George C. Edwards III dan Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji empat faktor dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya dan disposisi pada implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Setelah mengkaji empat faktor tersebut nantinya akan ditemukan berbagai gejala yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Selanjutnya gejala-gejala tersebut akan dikaji dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahannya.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan penetapan tempat atau penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan. Penempatan tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar Kota Semarang.

Dinas Pasar Kota Semarang dan beberapa pasar di kota Semarang dipilih menjadi lokus atau wilayah penelitian, karena Dinas Pasar Kota Semarang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan tangan panjang dari Walikota Semarang yang melaksanakan tugas urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pengelolaan pasar yang ada dalam wilayah Kota Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian atau responden disebut dengan istilah informan, yaitu individu atau kelompok yang memberi informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitiannya.

Sanafiah Faisal dalam (Sugiyono, 2009 : 221) mengemukakan bahwa subyek penelitian atau sample sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kreteria sebagai berikut :

- Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti

- Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
- Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
- Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dengan pertimbangan tersebut maka dalam penelitian ini penulis menunjuk beberapa informan yaitu:

1. Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang;
2. Kepala Seksi Penataan dan Pemetaan Dinas Pasar kota Semarang
3. Kepala Seksi Pemeliharaan bangunan Dinas Pasar Kota Semarang;
4. Pedagang pasar tradisional di Kota Semarang;
5. Pengunjung pasar tradisional.

Dengan adanya informan-informan tersebut, diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang. Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian dianalisis.

1.7.4 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2007: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini jenis-jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/auto tapes*, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berpartisipatif merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Dalam penelitian ini, peneliti harus mengamati kondisi dari implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sehingga dapat mengetahui gejala apa saja yang muncul. Untuk mendapatkan informasi / data yang lebih mendalam, peneliti juga harus mewawancarai informan yang sudah ditentukan.

b. Sumber Tertulis

Situasi-situasi tertentu di lapangan sering menghadapkan peneliti sehingga peneliti berusaha untuk mencari data tambahan lainnya seperti sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tertulis yaitu berupa buku, internet dan dokumen resmi.

c. Foto

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali manfaatnya. Hanya perlu diberi catatan khusus tentang keadaan dalam foto.

d. Data Statistik

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan. Statistik dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subyek pada latar penelitian. Namun, peneliti diharapkan tidak terlalu banyak mendasarkan diri pada data statistik, tetapi memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara yang mengantar dan mengarahkan penulis pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan masalah dan tujuan penelitiannya. (Moleong, 2007: 157-162)

1.7.5 Sumber Data

Data dalam Penelitian ini diperoleh dari sumber:

a. Data Primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data primer diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara ataupun melalui pengamatan langsung atau observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan mendatangi Dinas Pasar Kota Semarang sebagai lokus penelitian kemudian melakukan wawancara dengan informan yang sudah ditentukan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder berisi catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet, dan sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder dari buku dan internet serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Ciri utama dari penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan dari perananan peneliti itu sendiri sebagai penentu keseluruhan skenarionya. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

- a. Wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka, yaitu di mana para subjek atau informan mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.
- b. Observasi. Teknik observasi atau pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Teknik ini juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe Observasi Non-Partisipan (*Non-Participant Observation*). Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan

selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat yang sedang diamati.

- c. Dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa gambar-gambar, dokumen resmi, maupun data resmi yang didapatkan dari Dinas Pasar Kota Semarang.
- d. Studi Pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, peraturan, laporan-laporan, dokumen serta melalui internet.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007: 248) menyatakan bahwa, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

Interpretasi data adalah upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.

1.7.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas yang baik. Standar kredibilitas ini untuk menunjukkan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007: 330).

a. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai Implementasi Kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, maka penulis akan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kualitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara nantinya akan dicek juga dengan observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Apabila data yang dihasilkan berbeda-beda, maka penulis akan berdiskusi lebih lanjut dengan informan atau sumber data yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.